

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH, TEKNOLOGI INFORMASI DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

Dewi Jasmin¹, Suhesti Ningsih², Desy Nur Pratiwi³

Jurusan Akuntansi Sektor Publik, ITB AAS Indonesia

¹E-mail: dewijasmine021@gmail.com

² Email: hesti.hegi@gmail.com

³ Email: desynurpratiwi69@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study was to determine the effect of regional financial accounting system, information technology and internal control system on the level of financial report quality in the Sukoharjo District. The methodology used in this research is the quantitative. The population used is all regional work unit in Sukoharjo District.. In this study, a sample of 84 people was obtained. Based on the partial test, shows that the regional financial accounting system variable has a significant effect on financial report quality. Based on the second partial test, shows that the information technology variable has an effect on financial report quality. Based on the third partial test, shows that the internal control system variable has effect on financial report quality. Based on the results of the simultaneous data test, be concluded that simultaneously or together the variables of regional financial accounting system, information technology, and internal control system is a factor that affects the financial report quality variable.

Keywords: *regional financial accounting system, information technology, internal control system, financial report quality*

1. PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik perkembangannya sangat pesat sejalan dengan reformasi keuangan negara yang dilakukan di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang (UU) 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi titik awal penataan keuangan dan akuntansi keuangan negara dan pemerintahan. Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Maka dari itu sistem akuntansi menjadikan kebutuhan serta menjadi tuntutan bagi setiap pemerintah daerah. Manfaat dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas serta keandalan pengelola keuangan pemerintah.

Pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Agar pemerintah daerah dapat menjalankan kegiatan ini dengan efisien, efektif dan bertanggung jawab, maka diperlukan adanya alat yang memadai. Untuk masa sekarang alat yang biasanya digunakan adalah komputer. Karena komputer merupakan alat yang mengandung teknologi tinggi. Dalam bidang teknologi, khususnya teknologi informasi akan berpengaruh langsung terhadap sistem informasi akuntansi, yang biasanya digunakan oleh berbagai organisasi. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memberikan laporan keuangan dan mempertanggungjawabkan dengan baik.

Dengan adanya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat mengawasi dan memberikan keyakinan tercapainya tujuan suatu organisasi bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. SPIP dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar menciptakan integritas kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Peneliti memilih penelitian di daerah kabupaten Sukoharjo karena ingin mengetahui sejauh manakah pemahaman para pegawai SKPD dalam menjalankan atau menguasai sistem akuntansi keuangan daerah, dan seberapa efektifkah para pegawai SKPD memanfaatkan teknologi informasi yang sudah tersedia. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana peranan para pegawai SKPD dalam mengkoordinasi, mengembangkan serta mengkaji sistem pengendalian intern sebagai pihak akuntan. Pada tahun 2021 kabupaten Sukoharjo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020. Pemberian opini WTP kepada kabupaten Sukoharjo oleh BPK tahun 2020 merupakan opini ke-6 berturut-turut sejak tahun 2015. Opini tersebut membuktikan bahwa kabupaten Sukoharjo sampai tahun 2020 telah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Penelitian terdahulu yang mendasari dan mendukung penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah penelitian Indrayani dan Widiastuti (2020), Darmawan dan Darwanis (2018) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Berbeda dengan hasil penelitian dari Kartopawiro dan Susanto (2018), Harnoni (2017) membuktikan bahwa sistem akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah dibuktikan oleh hasil penelitian dari Pravasanti dan Ningsih (2019), Darmawan dan Darwanis (2018). Sedangkan hasil penelitian Harnoni (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Indrayani dan Widiastuti (2020), Mene, Karamoy dan Warongan (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah daerah dengan hasil bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara. Bertolak belakang dengan penelitian Budiawandan Purnomo (2014) yang membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Internal pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan mengambil judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sukoharjo?
- Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sukoharjo?
- Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap secara signifikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sukoharjo?
- Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sukoharjo?

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Menurut Abdul Hakim mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah

sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 (2006:76) yang terdapat pada pasal 232 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yaitu:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran, laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan beberapa unsur yaitu, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan (Financing).
- 2) Neraca SKPD
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Dalam akuntansi keuangan daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 233 terdiri dari empat sistem dan prosedur yaitu:

- 1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007 pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maksudnya adalah pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMN. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, maksudnya adalah pendapatan lain selain pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Prosedur dalam penerimaan kas daerah adalah proses mulai dari pencatatan, penggolongan atau terjadinya transaksi keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas daerah.

- 2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur dalam pengeluaran kas daerah adalah proses mulai dari pencatatan, penggolongan atau terjadinya transaksi keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas daerah.

- 3) Prosedur Akuntansi Aset Tetap/ Barang Milik Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan dari penghapusan aset. Usaha pemanfaatan dari penghapusan aset ini berupa penjualan, tukar guling (ruilslag), penyewaan atau pelaksanaan kerja sama operasi. Prosedur akuntansi aset yaitu dari pencatatan, pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, dan penyusunan aset yang digunakan SKPD. Prosedur ini digunakan untuk alat pengendali dalam pengelolaan aset yang digunakan SKPD.

- 4) Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah proses mulai dari pencatatan, penggolongan atau terjadinya transaksi keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi selain kas pada SKPD.

Kebijakan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 239 (2006:77) terdiri dari Pengakuan Akuntansi, Pengukuran Akuntansi, dan Penyajian Akuntansi. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam jurnal. Pengakuan atas transaksi terbagi menjadi 2 yaitu basis akrual dan basis kas. Kemudian pengukuran akuntansi yaitu, apakah suatu transaksi akan diukur dengan menggunakan nilai historis atau menggunakan harga pasar. Dan penyajian akuntansi atas kebijakan dan pelaksanaan akuntansi dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Realisasi Anggaran.

Tujuan sistem akuntansi keuangan daerah menurut Permendagri No 64 tahun 2013 adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP, untuk menunjukkan keakuntabilisan suatu entitas.

b. Teknologi Informasi

Menurut pengertian dari Unodan Lamatenggo (2013:57) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Pengertian teknologi informasi menurut *Information Technology Association of America* (ITTA) adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi merupakan perangkat penting yang harus dimiliki dalam bisnis untuk mengarsipkan dokumen-dokumen penting, mengelola informasi dengan lebih cepat, pengaruh ekonomi internasional (globalisasi), serta untuk menghadapi persaingan bisnis.

Dalam setiap entitas pelaporan keuangan pemerintahan dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap APBD yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari pencatatan hingga pelaporan keuangan sangat terkait dengan sistem akuntansi. Sistem akuntansi mengacu pada *System Application and Processing* (SAP), dalam perkembangannya diperlukan alat pendukung salah satunya adalah teknologi informasi.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat, di jaman sekarang banyak dimanfaatkan oleh para pebisnis serta badan pemerintahan, karena dapat mempercepat suatu pekerjaan seperti laporan keuangan. Menurut pengertian dari Unodan Lamatenggo (2011:57) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Menurut Hamdani Harfan (2012) ukuran penggunaan teknologi informasi dapat dilihat dari memiliki komputer yang cukup, jaringan internet, pemanfaatan jaringan komputer (LAN), proses akuntansi secara komputerisasi, pengolahan data menggunakan software, sistem informasi yang terintegrasi dan jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. Semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin baik.

Saat ini Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah dinyatakan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yaitu sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik atau disebut dengan *good governance*, dipemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah diwajibkan untuk memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, serta menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Saat ini pemerintah menyediakan informasi dalam bentuk elektronik yang dikenal dengan *E-Government*. Ada beberapa tipe model penyampaian *E-Government*:

- 1) *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), model ini memungkinkan penyampaian informasi dan layanan publik satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Contoh dari pelayanannya adalah pajak online, jaminan sosial, akte perkawinan, paspor, imigrasi, kesehatan, beasiswa dan lain-lain.
- 2) *Government-to-Business* (G2B), model ini memungkinkan layanan transaksi-transaksi antara pemerintah dengan pebisnis. Model ini mendukung pengelolaan pemerintah lebih efisien dan dapat meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan dengan sektor usaha

dan industri. Aplikasi yang mendukung kegiatan pemerintahan, seperti pemasaran produk dan jasa ke pemerintah yaitu dengan aplikasi *E-Procurement*. Pebisnis yang relevan terhadap G2B misalnya: pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan serta peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha atau bisnis.

- 3) *Government-to-Government (G2G)*, adalah layanan yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara online antar departemen atau lembaga pemerintahan suatu negara dengan negara lain melalui basis data terintegrasi. Contoh layanan data yang mungkin dapat dilakukan adalah ekspor-impor, tenaga kerja, beasiswa ke luar negeri, bantuan ke dan dari luar negeri, perdagangan.

Terwujudnya *E-government* dapat mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Serta mempengaruhi untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.

d. Sistem Pengendalian Intern

Pengertian pengendalian intern menurut Mulyadi (2013:164) adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dijelaskan juga pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang berisi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maka semakin kuat sistem pengendalian intern pemerintah akan semakin kuat pula pengaruh pada kualitas laporan keuangan. Terdapat lima komponen pengendalian internal yaitu:

- 1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
- 2) Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)
- 3) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
- 4) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
- 5) Pemantauan (*Monitoring*)

Dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan akan menghasilkan laporan keuangan yang baik, laporan keuangan yang baik adalah salah satu indikator bahwa didalam organisasi pemerintahan tersebut memiliki kinerja yang baik pula. Semakin baik sistem akuntansi keuangan yang diterapkan dalam organisasi pemerintahan maka semakin baik pula kinerja organisasi pemerintahan. Baiknya kinerja organisasi pemerintahan juga dipengaruhi dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, yang diperlukan untuk mengolah data yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data yang akan menghasilkan data laporan. Agar menghasilkan data laporan yang baik dan akurat diperlukan sistem pengendalian intern dari organisasi pemerintahan. Sistem pengendalian intern diperlukan karena untuk mengawasi kinerja para pegawai di suatu organisasi pemerintahan supaya dalam kegiatannya pelaporan keuangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Bila sistem pengendalian intern dalam penerapannya berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap opini dari BPK dalam mendapatkan status WTP, yang sudah didapatkan di kabupaten Sukoharjo dalam 6 periode berturut-turut sejak tahun 2015.

e. Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dengan mudah dan mudah dipahami oleh para pemakai. Menurut Heizer dan Render (2015), kualitas adalah keseluruhan fitur dan karakteristik sebuah produk atau jasa yang mengandalkan pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dijanjikan dan tersirat.

Kualitas laporan keuangan menurut pemerintah daerah menurut Defitri (2016) adalah kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian menyesatkan,

kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan menurut FASB dalam SAFC Nomor 2 yaitu:

- 1) Relevan, yaitu mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan dengan membantu pengguna untuk membentuk prediksi tentang hasil dari prediksi tentang hasil dari peristiwa masa lalu, sekarang dan masa depan. Dapat membuat sebuah perbedaan dalam keputusan dengan meningkatkan kapasitas pembuat keputusan untuk memprediksi atau dengan memberikan umpan balik terhadap harapan sebelumnya.
- 2) *Reability* (keandalan), suatu yang harus diverifikasi dengan metode akuntansi lain sehingga menghasilkan hasil yang sama (*verifiability*). Harus bersifat netral (*neutrality*) maksudnya adalah dalam menerapkan standar, perhatian utama pada relevansi dan reliabilitas informasi yang dihasilkan, bukan aturan yang memiliki kepentingan tertentu. Kemudian harus dapat dipercaya angka dan penjelasan yang dilaporkan, ada kesepakatan antara suatu ukuran atau deskripsi dan fenomena yang dimaksudkan untuk diwakili, diwakili yang dimaksud adalah sumberdaya ekonomi dan kewajiban serta transaksi-transaksi dan kejadian yang mengubah sumberdaya dan kewajiban tersebut (*representation faithfulness*).
- 3) Daya banding dan konsistensi, informasi laporan keuangan yang dapat dibandingkan antara laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya.
- 4) Pertimbangan cost-benefit, merupakan hal yang dianggap paling sulit diterapkan dalam praktik dan dianggap sebagai kendala dalam menyajikan informasi laporan keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan selama manfaat yang diperoleh dalam penyajian informasi tersebut melebihi biaya yang diperlukan, maka dari itu sebelum menyajikan informasi, manfaat yang akan diperoleh dari informasi tersebut harus dibandingkan dengan biaya yang akan timbul.
- 5) Materialitas karakteristik, merupakan pertimbangan utama yang menimbulkan pertanyaan apakah penyajian informasi tertentu akan mempengaruhi secara signifikan untuk mengambil keputusan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono(2016:135)).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Sukoharjo. Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah slovin, dimana penentuan sampel dilakukan dengan cara survei kepada responden yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini. Berikut adalah rumus slovin dalam menentukan jumlah sampel (Sugiyono 2011:37).

$$\text{Rumus Slovin: } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Error Margin (0,05)

Peneliti mengambil sampel dengan mengambil jumlah responden yaitu 105 responden. Dengan rumus slovin ukuran sampel yang dapat dihitung:

$$n = \frac{105}{1 + 105 (0,05)^2} = 84$$

Berdasarkan hasil dari penghitungan dengan menggunakan rumus slovin maka ukuran sampel yang dapat dihitung yaitu 84 sampel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1) Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa uji validitas dari data yang diperoleh bersifat valid dan memenuhi syarat. Dan uji reliabilitas dari sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern bersifat reliable dan memenuhi syarat uji reliabilitas.

2) Uji Asumsi Klasik

Hasil uji multikolinearitas di atas dapat diketahui variabel independen yaitu variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah/SKAD (X_1), Teknologi Informasi/TI (X_2), Sistem Pengendalian Intern/SPI (X_3), dan Kualitas Laporan Keuangan/KLK (Y) menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan dalam statistik dengan nilai *tolerance value* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Berdasarkan pengujian *Kolmogorov-S test* (KS) dengan bantuan program SPSS 21 diperoleh nilai *p-value* 0,845 > 0,05. Sehingga menunjukan keadaan yang tidak signifikan. Hal ini berarti H_0 diterima. Yang artinya bahwa residual berdistribusi normal (lolos uji normalitas).

3) Uji Regresi

a) Uji linear Berganda

TABEL 1
HASIL Uji REGRESI

Variabel	Coefficient
Constant	22.154
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah(X_1)	0,567
Teknologi Informasi (X_2)	0,230
Sistem Pengendalian Intern(X_3)	0,277
R^2	0,936
Adj. R^2	0,933
F-test	57,633

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut:

$$KLK = 22,154 + 0,567 \text{ SAKD} + 0,230 \text{ TI} + 0,277 \text{ SPI} + \varepsilon$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya nilai konstanta variabel Kualitas Laporan Keuangan dengan parameter positif sebesar 22,154. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern diasumsikan nol, maka kualitas laporan keuangan sebesar -0,928.
- Dari persamaan regresi diatas menunjukkan koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah dengan parameter positif sebesar 0,567. Setiap peningkatan

sistem akuntansi keuangan daerah 1 kali maka akan meningkat kualitas laporan keuangan sebesar 0,567.

- c. Dari persamaan regresi diatas menunjukkan koefisien regresi teknologi informasi dengan parameter positif sebesar 0,230. Setiap peningkatan teknologi informasi 1 kali maka akan meningkat kualitas laporan keuangan sebesar 0,230.
- d. Dari persamaan regresi diatas menunjukkan koefisien regresi sistem pengendalian intern dengan parameter positif sebesar 0,277. Setiap peningkatan sistem pengendalian intern 1 kali maka akan meningkat kualitas laporan keuangan sebesar 0,277.

b) Uji F

TABEL 2
HASIL UJI F

Model	F	Sig.
<i>Regression</i>	6,586	0,000 ^b
<i>Residual</i>		
Total		

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Uji F digunakan untuk membuktikan signifikansi pengaruh variable bebas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Teknologi Informasi (X_2), Sistem Pengendalian Intern(X_3) terhadap variable terikat Kualitas Laporan Keuangan (Y) secara simultan. Hasil uji F_{hitung} sebesar 6,586 lebih besar dari F_{tabel} 2,72 dengan $p-value$ sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis. Sehingga secara simultan variable Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Teknologi Informasi (X_2), Sistem Pengendalian Intern(X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

c) Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas yaitu variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Teknologi Informasi (X_2), Sistem Pengendalian Intern (X_3), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y). Jika nilai probabilitas signifikansi $\leq 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara individual variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansi $\geq 0,05$, maka hipotesis diterima. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS 21 dapat diketahui sebagai berikut:

TABEL 3
HASIL UJI t

Model	t	Sig.	Kesimpulan
1 (Constant)	5.623	0.000	

SKAD (X_1)	3.449	0.000	Berpengaruh
TI (X_2)	2.134	0.024	Berpengaruh
SPI (X_3)	3.340	0.036	Berpengaruh

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

1. Hasil analisis diperoleh dari nilai t_{hitung} 3,449 lebih besar dari t_{tabel} 1,66388 dengan p -value sebesar $0,023 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Sistem Akuntansi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas
2. Hasil analisis diperoleh dari nilai t_{hitung} 2,560 lebih besar dari t_{tabel} 1,66388 dengan p -value sebesar $0,012 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
3. Hasil analisis diperoleh dari nilai t_{hitung} 3,110 lebih besar dari t_{tabel} 1,66388 dengan p -value sebesar $0,003 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

d) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk menguji seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen sedangkan sisanya tidak dapat dijelaskan merupakan bagian variasi dari variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Apabila nilai $Adjusted R^2$ nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan sebaliknya apabila nilai $Adjusted R^2$ kecil maka pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen lemah. Berikut ini adalah hasil dari Uji Determinasi:

TABEL 4
HASIL UJI DETERMINASI (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,966 ^a	0,936	0,920

Sumber: Data Diolah, 2021

Hasil uji koefisien determinasi ($Adjusted R Square$) menunjukkan sebesar 0,92. Artinya 92% berarti dapat diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Teknologi Informasi (X_2), Sistem Pengendalian Intern (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y) mempunyai pengaruh yang nyata sebesar 92% sedangkan sisanya $(100\% - 92\%) = 8\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

b. Pembahasan

Hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 6,586 lebih besar dari F tabel sebesar 2,72 dengan p -value sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Teknologi Informasi (X_2), dan Sistem Pengendalian Intern (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hipotesis 1 terbukti kebenarannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi dan sistem pengendalian yang digunakan maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Oleh karena itu, guna mendapatkan kualitas laporan yang jujur, netral dan dapat diverifikasi maka ketiga aspek yang dipakai tersebut harus diterapkan dengan baik. Apabila ketiga aspek tersebut digunakan dengan kurang baik atau buruk maka kualitas laporan keuangan yang diperoleh juga akan menurun kualitasnya (buruk).

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 8,449 lebih besar dari t tabel 1,66388 dengan p -value sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hipotesis 2 terbukti kebenarannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, dalam penyusunan laporan keuangan perlu adanya penerapan sistem. Sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas disini yaitu sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Kehadiran dari adanya sistem akuntansi benar-benar berperan penting, hal tersebut dikarenakan peranannya dalam memastikan kualitas informasi pada laporan keuangan (Triwardana, 2017).

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,449 lebih besar dari t tabel 1,66388 dengan p -value sebesar $0,024 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara Teknologi Informasi (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hipotesis 3 terbukti kebenarannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi proses pengolahan data dengan komputer serta jaringan internet yang cukup akan sangat mendukung proses pengerjaan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik dalam pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang diperoleh.

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,340 lebih besar dari t tabel 1,66388 dengan p -value sebesar $0,036 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara Sistem Pengendalian Intern (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hipotesis 4 terbukti kebenarannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dapat juga dilihat dari seberapa baik sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam suatu perusahaan. Sistem pengendalian intern sangat penting untuk mengontrol, mengendalikan, mengawasi organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semakin baik sistem pengendalian yang diterapkan, semakin kuat pula pengaruh pada kualitas laporan keuangan.

5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis data yang menggunakan regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $6,586 > F_{tabel}$ 2,72 dengan *signifikansi* $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern merupakan faktor yang mempengaruhi variabel Kualitas Laporan Keuangan. Hasil uji determinan dengan nilai adjusted- R^2 sebesar 0,920 membuktikan bahwa 92% variabel

Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern sedangkan sisanya yaitu 8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

- b. Hasil penelitian diketahui bahwa besarnya nilai t_{hitung} variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar $8,449 > t_{tabel} 1,66388$ dengan *signifikansi* sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Tentunya jika suatu sistem akuntansi keuangan daerah berjalan dengan baik maka juga kualitas laporan keuangan yang didapatkan akan semakin baik, maka dari itu sistem akuntansi keuangan daerah sangat berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan.
- c. Besarnya nilai t_{hitung} variabel Teknologi Informasi sebesar $2,134 > t_{tabel} 1,66388$ dengan *signifikansi* sebesar $0,024 < 0,05$. hal ini berarti bahwa variabel Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Tentunya jika suatu pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dengan sangat baik berjalan dengan baik maka dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik, maka dari itu teknologi informasi sangat berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan.
- d. Variabel Sistem Pengendalian Intern mempunyai nilai t_{hitung} sebesar $3,340 > t_{tabel} 1,66388$ dengan *signifikansi* sebesar $0,036 < 0,05$. Hasil tersebut membuktikan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Tentunya jika suatu sistem pengendalian intern berjalan dengan baik maka juga kualitas laporan keuangan yang didapatkan akan semakin baik pula, maka dari itu sistem pengendalian intern sangat berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan.

REFERENSI

- Darmawan, Ayang & Darwanis. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1), 9–19.
- Fahmi, Irham. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hamzah B. Uno & Nina Lamatenggo. (2011). Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Heizer, Jay & Render, Barry. (2015), *Manajemen Operasi : Manajemen Keberlangsungan dan Rantai Pasokan*, edisi 11, Salemba Empat, Jakarta.
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16.
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 1–14.

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

- Kasmir.(2014). Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 (2002).Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 133–143.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok). *Journal Of Accounting*, 3(2), 1–13.
- Pravasanti, Y. A., & Ningsih, S. (2019). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 199.
- Peraturan Pemerintah No.60. (2008). *Tentang System Pengendalian Internal*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13.(2006).*Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59.(2007). Perubahan Atas 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71. (2010).*Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pilander, S. M., Saerang, D. P., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 9(2), 128–139.
- Purnomo, B.S (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 276.
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 8–17.

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

- Romney, Marshall B. dan Steinbart. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13, alihbahasa: Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. (2015). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Triwardana. Dhedy dkk. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)*. Diss. Riau University.